

Model Kebijakan Pemberdayaan di Pedesaan Indonesia

Empowerment Policy Model in Rural Indonesia

Sunardi, Yulian Sri Lestari
UIN Datokarama Palu
Jl. Diponegoro No.23, Kota Palu
Email: sunardi@uindatokarama.ac.id

Naskah diterima tanggal 15 Januari 2024. Naskah direvisi tanggal 3 Juni 2024.
Naskah disetujui tanggal 10 Juni 2024.

Abstrak

Sejumlah studi telah menemukan bahwa pemberdayaan pedesaan melalui berbagai skema telah terbukti cukup efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pedesaan. Namun faktanya, pemberdayaan yang berlangsung di desa belum banyak berkontribusi terutama dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. Studi ini berupaya untuk masuk dalam debat teoritis yang berlangsung dengan melihat bagaimana model kebijakan pemberdayaan yang relevan untuk konteks di Pedesaan, sekaligus untuk menjawab dalam kondisi apa pemberdayaan bisa berhasil dan gagal. Mengelaborasi konsep teori model kebijakan Thomas R Dye dan teori kebijakan Kenneth E. Pigg. Menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Artikel ini berpendapat bahwa model kebijakan pemberdayaan di pedesaan harus memperhatikan instrumen kebijakan pemberdayaan, seperti kepemimpinan dan program pemberdayaan. Instrumen ini yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan di pedesaan. Abstraksi kasus yang disajikan dalam artikel ini menjadi contoh yang baik untuk bisa memahami bagaimana model kebijakan pemberdayaan di pedesaan yang ideal.

Keywords: Kebijakan; Pemberdayaan; Kepemimpinan; Program Pemberdayaan; Pedesaan

Abstract

A number of studies have found that rural empowerment through various schemes has proven to be quite effective in encouraging community participation and at the same time improving the economic conditions of rural communities. However, others see the opposite as the empowerment that takes place in villages has not contributed much, especially in overcoming poverty in rural areas. This study attempts to enter into the ongoing theoretical debate by looking at how empowerment policy models are relevant to rural contexts, as well as to answer under what conditions empowerment can succeed and fail. Elaborating on the concept of Thomas R Dye's policy model theory and Kenneth E. Pigg's policy theory. This article argues that empowerment policy models in rural areas must pay attention to empowerment policy instruments, such as leadership and empowerment programs. This instrument will determine the success and failure of empowerment in rural areas. The case

abstract presented in this article is a good example for understanding what an ideal rural empowerment policy model.

Keywords: Policy; Empowerment; Leadership; Empowerment Program; Rural

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Pedesaan di Indonesia menjadi salah satu isu yang telah banyak dibicarakan dikalangan akademisi dan praktisi ([Bebbington et al., 2006](#); [Hermawati et al., 2023](#); [Kushandajani & Alfirdaus, 2019a](#); [McIntyre-Mills et al., 2019](#); [Nugroho, 2010](#); [Rustinsyah, 2019](#)). Fenomena ini setidaknya mulai ramai diperdebatkan sejak pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang secara tidak langsung menjadi payung hukum yang memperkuat aktivitas pemberdayaan di pedesaan ([Antlöv et al., 2016](#); [Badaruddin et al., 2021](#)). Hingga saat ini, ada begitu banyak skema kebijakan yang didorong oleh pemerintah untuk mempercepat aktivitas pemberdayaan di pedesaan ([Adam et al., 2022](#); [Gallaway & Bernasek, 2004](#); [Sakhiyya & Locke, 2019](#)). Di tingkat nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dicetuskan untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan. Melalui skema bantuan stimulus untuk UMKM sebesar Rp 96,21 triliun ([Haryo Limanseto, 2022](#)). Tujuannya, untuk memperkuat UMKM sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Data terbaru memperlihatkan bahwa melalui skema kebijakan tersebut, pemberdayaan di sektor ekonomi melalui UMKM telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% ([Lasmi Ariyanti, 2023](#)). Sementara ditingkat lokal, skema Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di gadang-gadang sebagai salah satu produk kebijakan yang diyakini akan mempercepat akselerasi pemberdayaan di Pedesaan. Untuk tahun ini, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp70 triliun untuk menunjang aktivitas di Pedesaan, termasuk pemberdayaan.

Sayangnya berbagai skema kebijakan pemberdayaan pemerintah di pedesaan sejauh ini dinilai belum efektif untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas pemberdayaan ([Guerreiro & Botetzagias, 2018](#); [Jakimow, 2018](#); [Kiky Srirejeki, 2018](#); [Kushandajani & Alfirdaus, 2019](#)). Sejumlah kendala yang terjadi dilapangan seperti terjadi kontestasi deliberatif yang melibatkan elit di pedesaan ([Gibson & Woolcock, 2008](#)), sarana dan prasana yang belum memadai, sumber daya yang terbatas, partisipasi masyarakat yang rendah menjadi deretan penghambat aktivitas pemberdayaan tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah ([Kiky Srirejeki, 2018](#); [Kushandajani & Alfirdaus, 2019b](#)). Selain itu, masih terdapat UMKM di pedesaan yang kesulitan mengakses bantuan pembiayaan formal. Data

terbaru menunjukkan bahwa sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi ([Haryo Limanseto, 2022](#)). Angka pengangguran yang berlangsung di desa juga masih relatif tinggi. Hingga saat ini angka pengangguran di pedesaan telah mencapai 3,45 % ([BPS, 2023a](#)). Data-data ini, meskipun tidak secara langsung tetapi sulit untuk tidak mengatakan bahwa aktivitas pemberdayaan yang berlangsung di pedesaan masih belum terintegrasi dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, seperti dalam hal keterlibatan masyarakat dan pengangguran.

Sementara itu, studi di Indonesia yang menempatkan kebijakan pemberdayaan bagi masyarakat desa sebagai konsen utama masih sangat minim ([Arifudin et al., 2013](#); [COLE, 2006](#); [Gallaway & Bernaseks, 2004](#); [Sakhiyya & Locke, 2019](#); [Wijaya et al., 2021](#)). Selama ini perhatian para sarjana di Indonesia ketika memotret aktivitas pemberdayaan selalu terhenti hanya pada persoalan peningkatan ekonomi, penguatan kelembagaan dan kinerja organisasi. Semua tema-tema ini sekali lagi absen memotret kebijakan desa sebagai salah satu isu utama. Padahal, jika melihat data yang tersedia hingga saat ini tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia mayoritas berlangsung di pedesaan. Data terbaru memperlihatkan bahwa kemiskinan di desa per September 2023 telah menyentuh 12,22%. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan yang hanya berada di angka 7,29 % ([BPS, 2023b](#)). Kondisi ini yang menurut penulis akibat absennya skema kebijakan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai aktor utama.

Penelitian ini berupaya mengisi gap penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengambil fokus pada bagaimana upaya pemerintah melalui skema kebijakan mendorong aktivitas pemberdayaan di pedesaan. Sudut pandang ini sekaligus untuk memberikan antitesa terhadap kebijakan pemberdayaan yang selama ini berlangsung di pedesaan Indonesia ([Arifudin et al., 2013](#); [Cole, 2006](#); [Gallaway & Bernasek, 2004](#); [Sakhiyya & Locke, 2019](#); [Wijaya et al., 2021](#)). Secara praktis, abstraksi yang ditawarkan pada artikel ini harapannya mampu memberikan cara pandang yang lebih kontekstual dalam memposisikan masyarakat khususnya pada kebijakan pemberdayaan. Sementara secara teoritis, penelitian ini akan berkontribusi pada debat teoritis terutama dalam memahami model kebijakan dalam skema pemberdayaan di pedesaan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan Pemberdayaan di Pedesaan

Ada dua pihak yang terus bersilang pendapat mewarnai dinamika pemberdayaan di Indonesia. Pihak pertama adalah mereka yang menempatkan pemberdayaan dalam narasi yang pesimis. Pihak ini terutama melihat bahwa pemberdayaan yang berlangsung di desa saat ini, melalui berbagai skema seperti Bumdes tidak cukup efektif bagi masyarakat desa ([Amri, 2019](#); [Ikhwansyah et al., 2020](#); [Lutfitasari & Mulyani, 2022](#)). Bumdes yang sejak pertama kali dibentuk harapannya bisa membawa perubahan signifikan, alih-alih menjadi beban baru bagi pemerintahan di desa. Sementara pihak lain melihatnya secara berbeda. Pihak ini menempatkan pemberdayaan sebagai katalisator yang mempercepat aktivitas pembangunan di pedesaan ([Abdur Rozaki & Siti Rohaya, 2019](#); Kania et al., 2021; [Salam, 2018](#)). Dalam konteks pedesaan, skema Bumdes telah mendorong pemberdayaan yang berlangsung pada masyarakat pedesaan. Meskipun berangkat dari argumen yang berbeda namun kedua pihak ini bersepakat bahwa aspek pemberdayaan adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Mereka yang pesimis pun mengakui hal tersebut. Bagi mereka gagalannya pemberdayaan di desa karena faktor teknis, bukan pada aspek pemberdayaannya. Aspek teknis ini yang perlu mendapat intervensi lebih besar.

Beberapa sarjana telah memberikan banyak petunjuk untuk bisa memahami bagaimana model pemberdayaan yang ideal. Salah satunya adalah konsep pemberdayaan yang diperkenalkan oleh Kenneth E. Pigg, dengan konsep yang sangat populer yaitu *Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community Development* ([Pigg, 2002](#)). Lewat karya ini, Pigg mengatakan bahwa seringkali pemberdayaan yang berlangsung hanya menempatkan individu sebagai subyek. Perhatian dan sudut pandang lebih banyak diarahkan pada personal individu. Disaat bersamaan dimensi mengenai kolektivitas seringkali terabaikan. Padahal, dalam konteks pemberdayaan kolektivitas sosial menjadi instrumen penopang. Lanjut Pigg, memandang bahwa perhatian yang sangat individual sentris tidak dibarengi dengan melihat pada aspek yang substansial, seperti misalnya bagaimana kepemimpinan seorang individu. Mayoritas pandangan individual sentris ini hanya melihat pada perilaku pribadi (*self empowerment*). Akibatnya, kegagalan dan keberhasilan pada kegiatan pemberdayaan lebih banyak dibenturkan pada persoalan personal. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi dalam konteks melihat pemberdayaan masih menyisahkan banyak celah.

Secara sederhana, pandangan Pigg menempatkan aspek kepemimpinan sebagai variabel yang sangat penting dalam aktivitas pemberdayaan. Kepemimpinan sebagai katalisator yang bisa mempercepat realisasi pemberdayaan ([Pigg, 2002](#)). Meskipun secara konseptual, ada irisan yang kontradiksi dari pandangan Pigg terutama dalam hal menolak instrumen individual sentris tetapi disaat bersamaan menerima kepemimpinan. Sementara kedua hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Namun yang perlu dicatat, kepemimpinan dalam pengertian Pigg terlepas dari konteks personal. Pengertian kepemimpinan ditempatkan dalam dimensi yang lebih luas, yaitu kolektivitas. Pada konteks pemberdayaan, kepemimpinan dilihat dari kacamata masyarakat. Bahwa sebuah komunitas, masyarakat memerlukan kepemimpinan yang ideal untuk menopang pemberdayaan. Kepemimpinan disini sendiri diyakini oleh Pigg sebagai penggerak yang bisa memobilisasi masyarakat ikut terlibat secara sukarela. Gagasan Pigg mengenai aspek kepemimpinan sebagai hal yang penting dalam pemberdayaan yang dijadikan sebagai titik pijak dalam artikel ini. Bagaimana kemudian aspek ini dilihat dalam dua konteks lokasi yang berbeda, antara pedesaan dan daerah urban.

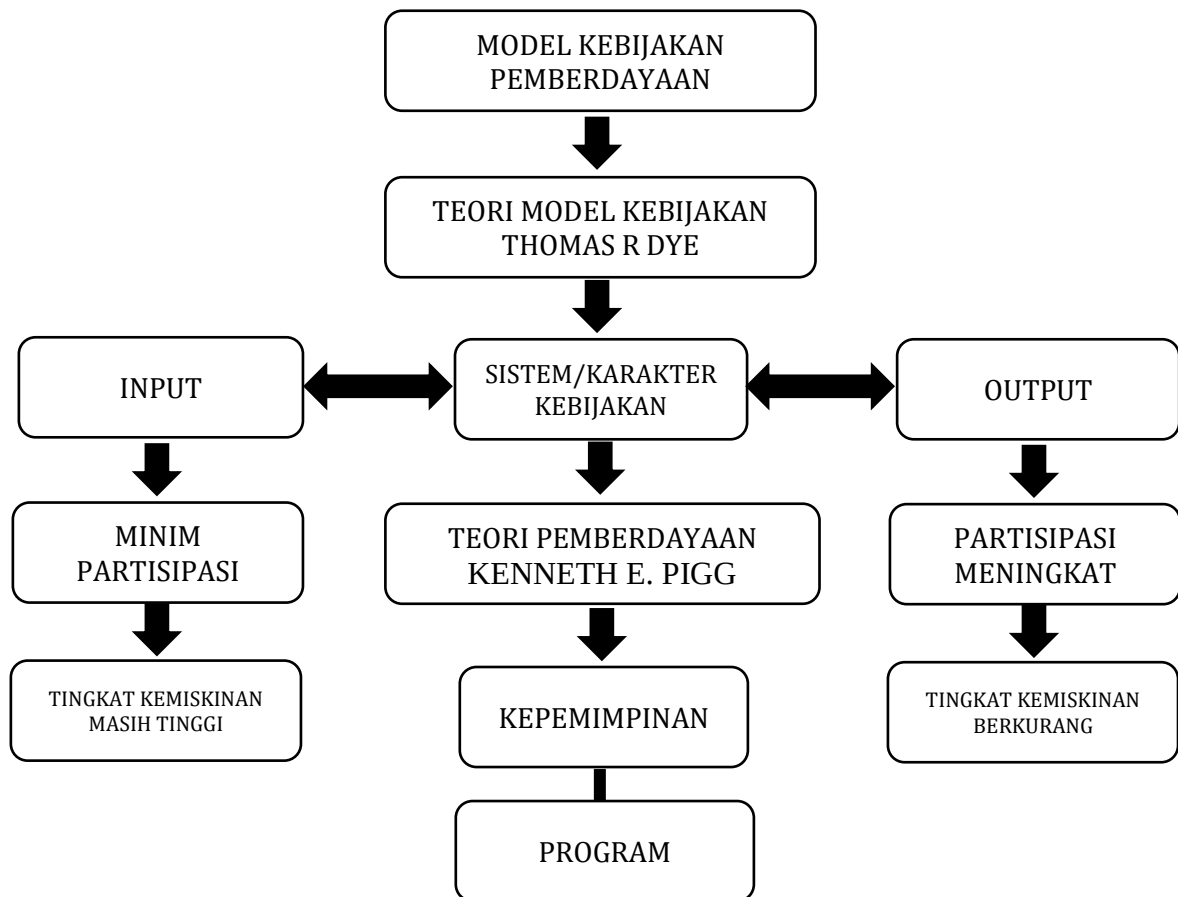
Model Kebijakan Pemberdayaan

Untuk model kebijakan pemberdayaan mengembangkan konsep dari model kebijakan yang dipopulerkan oleh Thomas R Dye. Mengadopsi dari karya Dye yang berjudul *Governmental Structure, Urban Environment, and Educational Policy* ([Dye, 1967](#)). Dye berupaya mengembangkan model kebijakan dengan melihat pada tiga aspek, yaitu input, sistem kebijakan (politik) dan output. Dalam konteks pemberdayaan gagasan Dye ini digunakan untuk melihat sejauhmana efektivitas kebijakan dapat bermanfaat di masyarakat. Pada konteks pemberdayaan gagasan ini diadopsi untuk melihat bagaimana kebijakan pemberdayaan yang ada telah berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan yaitu kemiskinan.

Kerangka pemikiran Dye dalam skema kebijakan dititik beratkan pada input. Dalam hal input pertanyaan penting yang harus dijawab adalah persoalan apa yang akan diintervensi. Pada bagian ini, memuat mengenai sejumlah masalah yang menjadi titik berangkat mengapa kebijakan itu harus dibuat. Untuk kasus pemberdayaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masalah yang termasuk dalam kategori input adalah partisipasi masyarakat dan kemiskinan. Kedua persoalan ini yang dianggap menjadi masalah utama. Kemudian, aspek kedua yang menjadi perhatian Dye adalah bagaimana sistem

kebijakan (politik) yang berlangsung di lokasi tersebut. Sistem kebijakan ini berkaitan dengan kondisi kebijakan saat ini yang bersinggungan dengan masalah input. Sederet pertanyaan yang diajukan Dye untuk memudahkan mengidentifikasi sistem kebijakan tersebut adalah, apakah sudah ada kebijakan yang mengatur atau telah menyinggung persoalan utama tersebut (input). Jika sudah ada, aspek mana yang telah diatur dan aspek mana yang belum mendapat banyak perhatian. Termasuk dalam hal, siapa yang bertanggung jawab pada program tersebut. Apakah organisasi publik, swasta atau personal. Aspek-aspek ini menjadi kata kunci untuk mengidentifikasi sistem kebijakan. Jika mengambil konteks pada kebijakan pemberdayaan, maka konteks sistem kebijakan ini lebih banyak diarahkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai seperangkat regulasi yang menjadi dasar pada setiap kegiatan pengembangan dan pemberdayaan yang berlangsung di desa. Terakhir adalah output. Aspek output berkenaan dengan rekayasa apa yang akan dilakukan sekaligus capaian yang diharapkan dalam skema kebijakan yang akan dibuat. Konteks penelitian ini, output berkaitan dengan partisipasi dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat pedesaan.

Dengan memadukan gagasan Dye mengenai skema kebijakan dan Pingg tentang teori pemberdayaan, maka secara sederhana dapat disusun kerangka penelitian mengenai model kebijakan pemberdayaan sebagaimana yang tergambarkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: Dikembangkan dari pemikiran Thomas R Dye tentang Model Kebijakan dan Pigg tentang teori pemberdayaan (Dye, 1967; Pigg, 2002)

Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui beberapa cara. Diantaranya, pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara langsung. Proses wawancara berlangsung dengan model semi formal. Penulis membuat serangkaian daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Daftar pertanyaan tersebut bersifat umum dan tidak mengikat. Dalam proses wawancara berlangsung secara alamiah, baik penulis dan informan tidak tergantung sepenuhnya pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara berlangsung dengan durasi 20 hingga 50 menit setiap orang. Total ada enam informan yang berhasil diwawancarai. Untuk konteks penelitian ini, artikel menggunakan anonim terkait dengan biodata informan. Selain wawancara, proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara observasi. Proses observasi dilakukan melalui mekanisme, penulis terlibat langsung dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi. Penulis mengamati dengan dekat, melihat proses dan mekanisme proses pemberdayaan secara berlangsung. Ada dua lokasi yang penulis amati, yaitu

pemberdayaan yang berlangsung di Pedesaan Sinjai dan di kota Makassar. Kedua daerah ini mewakili daerah pedesaan dan daerah urban. Selain itu, observasi juga dilakukan di beberapa instansi yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan penelusuran data serta dokumen. Pada tahap ini, penulis melakukan *review* terhadap beberapa studi terkait dengan kebijakan pemberdayaan yang berlangsung di Indonesia. Proses ini untuk mencari *novelty* sekaligus untuk menempatkan studi ini dalam debat studi pemberdayaan yang sudah ada sebelumnya. Sementara penelusuran data serta dokumen dilakukan dengan menelusuri laporan resmi pemerintah yang terkait dengan aktivitas dan program pemberdayaan pedesaan. Beberapa laporan misalnya, seperti penggunaan anggaran untuk kegiatan program pemberdayaan di pedesaan. Serta laporan resmi lain yang relevan dengan kebutuhan studi ini.

Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya yang dilakukan adalah melakukan pengelompokan data dan informasi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dikelompokkan dengan terlebih dahulu membuat kategorisasi data dan informasi. Proses kategorisasi data dan informasi dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, kategori untuk data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pemberdayaan, kemudian kategori data dan informasi kedua terkait dengan program pemberdayaan dan ketiga kategori data dan informasi yang terkait dengan skema pemberdayaan pedesaan. Proses kategorisasi data dan informasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan dan pola dari setiap kategori data dan informasi yang ada.

Tahap terakhir dari seluruh rangkain adalah interpretasi data dan informasi. Tahap ini adalah proses meginterpretasikan data dan informasi. Proses interpretasi data dan informasi dilakukan dengan menggunakan konsep model kebijakan ala Thomas R. Dye dan teori pemberdayaan Kenneth E. Pigg. Kedua teori ini yang memandu penulis untuk menjelaskan temuan data dan informasi. Kemudian untuk memperkuat argumentasi dari hasil intepretasi tersebut, digunakan proses triangulasi data dengan merujuk pada hasil survey yang telah dilakukan. Hasil dari semua proses tersebut kemudian disajikan dalam artikel ini.

HASIL DAN DISKUSI

Aspek Kepemimpinan

Skema kebijakan pemberdayaan selama ini masih mengabaikan faktor kepemimpinan dalam aktivitas pemberdayaan ([Hugo, 2003](#); [Koeswahyono et al., 2022](#); [Maryunani, 2019](#); [Venning, 2010](#)). Temuan lapangan pada artikel ini menunjukkan hal sebaliknya, bahwa faktor kepemimpinan menjadi salah satu variabel yang sangat penting dalam aktivitas pemberdayaan. Faktor kepemimpinan terutama diperlukan dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Pada penelitian ini, faktor kepemimpinan dilihat dalam dua lokus yang berbeda. Pertama, faktor kepemimpinan dalam pemberdayaan yang berlangsung di desa. Kedua, faktor kepemimpinan dalam pemberdayaan yang berlangsung di daerah urban. Kedua lokus ini memberikan dimensi yang berbeda terkait dengan pengaruh kepemimpinan dalam pemberdayaan.

Dimensi pertama, kepemimpinan dalam pemberdayaan yang berlangsung di daerah pedesaan. Pada dimensi ini, temuan pada artikel ini menunjukkan bahwa kepemimpinan menjadi sangat penting. Dimensi ini yang harus menjadi prioritas sebelum melakukan aktivitas pemberdayaan. Faktor kepemimpinan menjadi semacam perantara yang akan menghubungkan program pemberdayaan dengan masyarakat pedesaan secara umum. Dengan kata lain, bahwa kata kunci keberhasilan kebijakan pemberdayaan yang berlangsung di pedesaan ada pada "kepemimpinan".

"Ada karakteristik yang sangat berbeda ketika melakukan kegiatan pemberdayaan di pedesaan. Bahwa di pedesaan penting sekali memetakan terlebih dahulu sosok dan individu yang berpengaruh sebelum memperkenalkan program. Hal ini sangat berbeda ketika melakukan pemberdayaan yang berlangsung di daerah perkotaan. Ciri ini yang menurut kami menjadi ciri khas pada masyarakat pedesaan. Sosok individu menjadi sangat penting" (Ningsih, Penanggung Jawab Wilayah Bidang Program, 18 Oktober 2023).

Temuan pada artikel ini mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh Pigg yang telah menempatkan faktor kepemimpinan menjadi prioritas dalam hal pemberdayaan ([Pigg, 2002](#)). Meskipun sebagai catatan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pigg tidak semuanya terkonfirmasi pada artikel ini. Di beberapa aspek misalnya desain organisasi belum banyak dieksplorasi oleh Pigg. Namun, Spreitzer menambal kekurangan yang telah di tinggalkan oleh Pigg dengan melihat bahwa kepemimpinan organisasi dapat mendorong partisipasi masyarakat ([Spreitzer, 2007](#)). Sementara itu, secara keseluruhan artikel ini menempatkan kepemimpinan sebagai faktor dominan setelah melihat bagaimana proses dan mekanisme ini

berlangsung di desa. Dalam proses yang terjadi dilapangan, ciri dan watak masyarakat pedesaan yang hidup dengan basis-basis sosial budaya yang kental sangat bergantung pada sosok tertentu. Ketergantungan pada sosok ini yang kemudian ikut mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat pedesaan, termasuk dalam konteks pemberdayaan. Mereka secara sukarela terlibat dalam proses dan aktivitas yang dilakukan selama individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut merupakan sosok yang bagi mereka berpengaruh. Sementara sebaliknya, mereka secara tidak langsung akan melakukan resistensi pada aktivitas dan program pemberdayaan selama dalam kegiatan tersebut tidak melibatkan individu yang berpengaruh.

”Sebelum kami melakukan aktivitas pemberdayaan di desa, memang hal yang pertama kami lakukan adalah mengidentifikasi siapa sosok yang berpengaruh di desa ini. Siapa yang menjadi pemimpin mereka. Ini penting dilakukan, sebab secara umum masyarakat pedesaan ini biasanya mengikut pada pemimpin mereka atau orang yang mereka anggap tokoh” (Ningsih, Penanggung Jawab Wilayah Bidang Program, 18 Oktober 2023).

Hasil wawancara tersebut terkonfirmasi dari hasil survey, yang menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keikutsertaan masyarakat terlibat pada program pemberdayaan. Hasil survey memperlihatkan bahwa sekitar 60% responden yang menjawab bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar, kemudian 30% responden yang memberikan pendapat berpengaruh dan sisanya hanya 10% memberikan pandangan yang berbeda bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh.

Karakteristik semacam ini sangat berbeda di daerah perkotaan. Pada daerah urban, faktor kepemimpinan tidak terlalu penting. Bukan berarti bahwa dalam aktivitas pemberdayaan kepemimpinan tidak diperlukan, tetapi lebih kepada upaya intervensi sosial dan memobilisasi di daerah perkotaan, masyarakat relatif tidak terlalu bergantung pada sosok tertentu. Ada semacam kadar kemandirian yang sangat berbeda antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat yang hidup di daerah urban. Jika sebelumnya, di daerah pedesaan tingkat kemandirian masyarakat sangat minim sementara di daerah urban kemandirian masyarakat relatif lebih baik. Dampak dominonya pada mobilisasi aktivitas pemberdayaan yang tidak memerlukan semacam sosok yang berpengaruh.

”Kalau di daerah perkotaan memang kebalikan dari kondisi yang kami hadapi di desa. Di daerah urban ini justru kami mengabaikan aspek kepemimpinan. Karena kami melihat karakteristik ini tidak terlalu banyak membantu dalam mendukung program pemberdayaan” (Ningsih, Penanggung Jawab Wilayah Bidang Program, 18 Oktober 2023).

Salah satu kondisi yang membuat kepemimpinan mendapat ruang yang sangat terbatas dalam aktivitas pemberdayaan di daerah perkotaan adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Berkebalikan dari kondisi sosial budaya masyarakat pedesaan yang nuansa ikatan kulturalnya masih sangat kental, di daerah urban ikatan kultural semacam ini relatif sangat minim. Masyarakat urban lebih banyak terbentuk dari basis masyarakat yang rasional, dimana aspek individu memiliki nuansa yang lebih kuat ketimbang dengan nuansa kultural. Dampaknya, pada tingkat ketergantungan masyarakat yang bisa lebih mandiri dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Sehingga pada konteks memobilisasi aktivitas pemberdayaan di perkotaan tidak mementingkan sosok tokoh tertentu dan kepemimpinan.

”Mendekati masyarakat perkotaan harus didekati dengan cara yang berbeda. Mereka bisa dikatakan adalah masyarakat yang merdeka dalam artian tidak bergantung pada siapa saja. Sehingga dalam mendekati mereka agar ingin terlibat dalam aktivitas pemberdayaan harus dari rumah ke rumah. Memang ini memerlukan waktu, tetapi seperti inilah ciri masyarakat urban”. (Mita, Penanggung Jawab Wilayah Bidang Program, 18 Oktober 2023).

Ilustrasi kasus yang berlangsung di dua lokus ini telah mengkonfirmasi keterlibatan kepemimpinan dalam aktivitas pemberdayaan. Meskipun berangkat dari latar belakang sosial yang berbeda antara desa dan daerah urban yang kemudian sebagai dampak dominonya berujung pada taraf ketergantungan terhadap kepemimpinan yang juga berbeda. Tetapi, kedua latar belakang sosial ini antara desa dan daerah urban dipertemukan pada satu argumen yang sama, yaitu faktor kepemimpinan memberikan dimensi yang berbeda dalam aktivitas pemberdayaan, terutama dalam memobilisasi masyarakat untuk terlibat. Pengalaman empirik pada kasus yang berlangsung pada artikel ini sangat berguna untuk bisa memahami bagaimana model kebijakan pemberdayaan yang ideal untuk dua lokus baik di desa dan daerah urban.

Aspek Program Pemberdayaan

Bagian berikutnya yang juga penting diperhatikan dalam skema kebijakan pemberdayaan adalah aspek program. Sejauh pengamatan penulis, program pemberdayaan belum mendapat banyak ruang dalam skema kebijakan pemberdayaan. Lebih lanjut, program pemberdayaan belum mendapat alas hukum baik ditingkat nasional ataupun di tingkat lokal. Kalaupun ada kebijakan yang menyangkut mengenai program pemberdayaan, biasanya kebijakan tersebut bersifat umum. Belum membedakan antara lokus yang berlangsung di desa dan daerah urban. Sementara bagi artikel ini seperti yang telah dikatakan sebelumnya pada bagian kepemimpinan, bahwa penting untuk mengidentifikasi lokasi

kegiatan pemberdayaan. Proses identifikasi ini tidak hanya berguna untuk memetakan antara desa dan daerah urban, tetapi lebih dari itu bahwa proses identifikasi akan sangat berguna terutama dalam kaitannya dengan intervensi kegiatan atau program pemberdayaan yang akan dilakukan.

Temuan lapangan kami menunjukkan bahwa lokus antara daerah di pedesaan dengan daerah urban memiliki corak yang berbeda. Tingkat keberhasilan program pemberdayaan yang berlangsung baik di desa dan di daerah urban sangat ditentukan oleh intervensi program. Hasil survey memperlihatkan bahwa sebesar 50% responden mengatakan jika program akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan, sementara 40% responden lainnya mengatakan program berpengaruh dan sisanya 10 % dari responden yang memberikan jawaban bahwa program tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan baik di pedesaan maupun daerah urban (Lihat Gambar 1). Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Pigg dan Spreitzer bahwa program pemberdayaan akan berkaitan dengan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat ([Pigg, 2002](#); [Spreitzer, 2007](#)). Ketika program pemberdayaan tersebut sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat maka keikutsertaan dan partisipasi masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, ketika program pemberdayaan yang ditawarkan tidak terintegrasi dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat maka partisipasi dan keikutsertaan masyarakat akan menjadi sangat rendah.

Pada artikel ini, menemukan bahwa program antara desa dan daerah urban yang tergambarkan di lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk konteks di desa, program pemberdayaan yang relevan adalah program pemberdayaan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Di Sinjai misalnya, aktivitas ekonomi masyarakat lebih banyak digerakan oleh kegiatan pertanian dan perkebunan. Salah satu desa di Sinjai bahkan menjadi desa percontohan untuk kegiatan pemberdayaan yang terintegrasi dengan kawasan bisnis dengan menjadikan perkebunan sebagai basis utama perekonomiannya. Lebih tepatnya pada kegiatan perkebunan kopi. Dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan di Sinjai yang banyak berkecimpung di perkebunan kopi, maka program pemberdayaan yang relevan adalah program pemberdayaan peningkatan produksi dan manajemen pemasaran kopi.

”Awalnya kami datang ke desa di Sinjai belum mengetahui potensi ekonomi masyarakat. Namun seiring dengan waktu, kami melihat bahwa produksi kopi di sini cukup besar. Sayangnya, produksi yang besar ini tidak berjalan lurus dengan pendapatan petani kopi. Lalu kami berfikir, apa yang salah? Ternyata hasil

identifikasi kami, masyarakat belum memahami dengan baik cara mengelola dan memanejemen khususnya dalam hal produksi dan pemasaran” (Ningsih, Penanggung Jawab Wilayah Bidang Program, 18 Oktober 2023).

Program pemberdayaan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat berimplikasi secara domino pada keaktifan dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program tersebut. Masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Pada konteks di Sinjai, partisipasi masyarakat terlihat dari keikutsertaan masyarakat. Artikel ini melihat ada dua keikutsertaan dan partisipasi yang diperlihatkan oleh masyarakat di pedesaan Sinjai. Pertama, keikutsertaan dan partisipasi dalam hal kegiatan. Mereka selalu aktif dan terlibat pada setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di desa. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa keikutsertaan mereka tidak terlepas dari program pemberdayaan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi mereka. Bentuk partisipasi dan keikutsertaan yang kedua dalam hal mempraktekan secara langsung muatan dari program pemberdayaan. Masyarakat di Sinjai tidak hanya ikut andil dalam setiap kegiatan, tetapi lebih dari itu mereka ikut melaksanakan dan sekaligus memperluas produksi kopi dengan merealisasikan tata kelola sesuai dengan muatan pada program pemberdayaan.

Sementara untuk masyarakat di daerah urban, program pemberdayaan yang tepat adalah program pemberdayaan yang memberikan insentif secara langsung. Watak ini sangat berbeda dengan masyarakat di pedesaan. Pada masyarakat pedesaan program pemberdayaan bersifat jangka panjang. Kemanfaatan dari penerima program akan dirasakan beberapa saat setelah program pemberdayaan. Sementara untuk masyarakat di daerah urban, program pemberdayaan harus bersifat jangka pendek. Kemanfaatan yang diterima harus lebih cepat. Dengan kata lain, bahwa efek yang ditimbulkan dari aktivitas pemberdayaan harus sesegera mungkin. Masyarakat di daerah urban, seperti yang telah disinggung sebelumnya lebih didominasi oleh sifat rasionalitas dengan individualitas yang sangat tinggi. Mereka tidak memiliki semacam dukungan sosial yang bisa digunakan untuk menunggu efek dari program pemberdayaan. Sebaliknya bagi masyarakat pedesaan yang hidup dalam latar belakang sosial yang sangat tinggi, memiliki dukungan sosial yang sangat tinggi. Sehingga meskipun kemanfaatan dari program pemberdayaan baru bisa dirasakan dalam waktu yang relatif lama tidak menjadi masalah. Dengan kondisi seperti itu, program pemberdayaan yang lebih relevan untuk masyarakat di daerah urban adalah program pemberdayaan yang bersifat ekonomis.

”Masyarakat urban memiliki ciri sendiri. Mereka tidak bisa menunggu lama. Kami telah mempelajari ini cukup lama. apa yang dilakukan hari ini harus mereka nikmati besoknya” (Randi, penanggung jawab pemberdayaan ekonomi di daerah Urban, 20 Oktober 2023)

Kedua kasus yang telah diabstraksikan di bagian ini telah memperlihatkan bagaimana pendekatan program dalam kegiatan pemberdayaan harus memperhatikan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahwa aktivitas ekonomi masyarakat ikut berperan dalam mendorong partisipasi dan keaktifan masyarakat pada kegiatan pemberdayaan. Selain itu, durasi waktu yang bisa ditimbulkan dari aktivitas pemberdayaan juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Dalam kasus diatas, program pemberdayaan yang memiliki durasi kemanfaatan yang bisa dinikmati lebih cepat akan relatif diminati oleh masyarakat, terutama pada masyarakat urban. Sebaliknya, untuk program pemberdayaan yang durasi waktu kemanfaatannya lama bisa dirasakan oleh masyarakat kurang diminati oleh masyarakat.

Model Kebijakan Pemberdayaan

Kasus diatas menjadi contoh yang baik untuk memandu pembaca memahami bagaimana model kebijakan pemberdayaan yang ideal, terutama dalam kaitannya pada mobilisasi masyarakat di pedesaan maupun di daerah urban untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Artikel ini membongkar temuan tersebut dengan kembali merujuk pada konsep model kebijakan Thomas R. Dye tentang *Governmental Structure, Urban Environment, and Educational Policy* ([Dye, 1967](#)) dan teori pemberdayaan Kenneth E. Pigg dalam sebuah karyanya *Three Faces Of Empowerment: Expanding The Theory Of Empowerment In Community Development* ([Pigg, 2002](#)) sebagai konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana skema kebijakan yang ideal untuk pemberdayaan di dua lokasi yang berbeda antara desa dan daerah urban. Dengan argumen bahwa, pemberdayaan yang berlangsung baik di desa maupun di daerah urban penting untuk memperhatikan aspek kepemimpinan yang melekat pada personal, sekaligus pada kemanfaatan program.

Secara singkat, desain untuk skema kebijakan pemberdayaan yang relevan untuk dua lokus antara desa dan daerah urban adalah skema kebijakan pemberdayaan yang menepatkan aspek kepemimpinan sebagai katalisator utama. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Pigg bahwa selain desain organisasi, kepemimpinan juga perlu mendapat perhatian dalam aktivitas pemberdayaan begitupun yang diperkuat oleh Spretzer tentang hubungan positif

antara kepemimpinan organisasi partisipatif dan pemberdayaan ([Pigg, 2002](#); [Spreitzer, 2007](#)). Pada penelitian ini, faktor kepemimpinan sebagai instrumen yang penting, untuk memastikan keikutsertaan dan mobilisasi masyarakat ikut dan terlibat pada setiap aktivitas pemberdayaan. Sehingga secara praktis, dalam sudut pandang kebijakan instrumen kepemimpinan ini perlu mendapat perhatian. Misalnya, bagaimana skema kebijakan pemberdayaan yang berlangsung tidak hanya konsen pada upaya mendorong keterlibatan masyarakat secara penuh, tetapi perlu mulai memikirkan untuk memberi ruang yang lebih besar pada peran sentral beberapa individu atau personal-personal yang punya modal sosial yang memadai. Keterlibatan individu-individu semacam itu telah terbukti cukup efektif untuk menopang kegiatan pemberdayaan di pedesaan. Kasus di pedesaan Sinjai menjadi contoh kasus yang sangat baik untuk melihat keberhasilan tersebut.

Selain itu, skema kebijakan pemberdayaan di pedesaan juga perlu menempatkan aspek kemanfaatan sebagai variabel penting. Aspek kemanfaatan yang dimaksud disini pada selang waktu minimal yang diperlukan bagi masyarakat agar bisa merasakan manfaat pemberdayaan. Aspek kemanfaatan ini penting sebab, karakteristik desa dan daerah urban memiliki taraf waktu kemanfaatan yang berbeda. Di desa, skema kebijakan pemberdayaan lebih tepat dengan program yang memberikan kemanfaatan dalam jangka waktu relatif panjang. Artinya, kegiatan program pemberdayaan tidak harus dinikmati langsung oleh masyarakat. Misalnya, bagaimana kegiatan pemberdayaan bagi petani kopi di Sinjai yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mendistribusikan pengetahuan mengenai tata kelola bisnis kopi yang ideal. Begitupun dengan pemberdayaan yang menyangkut mengenai pembudidayaan kopi. Semua proses ini memerlukan waktu yang cukup lama dengan hasil yang juga sebanding. Sebaliknya, untuk konteks masyarakat di daerah urban pemberdayaan yang dilakukan harus di dorong dengan skema yang waktu kemanfatannya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat urban sekali lagi tidak memiliki semacam dukungan sosial yang memadai, sehingga tidak memiliki alternatif lain. Mereka ketika tidak bekerja dan tidak beraktivitas akan sangat rentan secara sosial. Pilihan untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan juga karena kalkulasi aktivitas tersebut memberikan insentif baik itu berupa ekonomi dan non ekonomi, paling tidak aktivitas tersebut sesegera mungkin mendatangkan insentif bagi mereka.

KESIMPULAN

Skema kebijakan pemberdayaan dengan menitik beratkan pada aspek kepemimpinan dan program telah terbukti efektif. Kasus yang berlangsung di Pedesaan Sinjai dan daerah Urban Makassar menjadi contoh yang baik dalam melihat bagaimana aspek kepemimpinan dan program sangat berdampak terhadap mobilisasi dan keikutsertaan masyarakat pada kegiatan pemberdayaan. Temuan ini telah memperluas pemahaman mengenai skema kebijakan pemberdayaan yang ideal di kawasan pedesaan. Ini sekaligus melengkapi berbagai studi kebijakan pemberdayaan yang selama ini ada. Jika sebelumnya studi mengenai kebijakan pemberdayaan banyak didekati dengan personalifikasi, konflik aktor dan kelembagaan ([Hohe, 2004](#); [Maton, 2008](#); [Muddassar Khan et al., 2015](#); [Natland & Hansen, 2017](#); [Staples, 1990](#); [Webster et al., 2019](#)). Artikel ini memberikan tawaran perspektif baru dengan mencoba menjelaskan kebijakan pemberdayaan dengan melihat pada aspek kepemimpinan dan program pemberdayaan.

Pada akhirnya, jika program pemberdayaan diharapkan berhasil terutama di daerah pedesaan maka skema kebijakan pemberdayaan harus menjadikan kedua instrumen tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas pemberdayaan. Meskipun beberapa sarjana lain mengungkapkan bahwa ada sisi keterbatasan dalam program pemberdayaan yang menitikberatkan pada aspek kepemimpinan dan aspek kemanfaatan ([Nikkhah & Redzuan, 2010](#); [Sianipar et al., 2013a, 2013b](#); [Vernon & Qureshi, 2000](#)). Keterbatasan tersebut dalam kaitannya dengan ketergantungan masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan ini sebagai dampak domino dari adanya nuansa kepemimpinan yang lebih dominan. Sementara aspek kemanfaatan berimplikasi negatif pada partisipasi masyarakat yang akan fluktuatif. Ada semacam kalkulasi untung-rugi yang menjadi motif bagi masyarakat yang akan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Kalkulasi ini pada akhirnya menentukan kadar keikutsertaan masyarakat. Tetapi, kendala ini meskipun telah ditemukan dibanyak tempat, hanya saja untuk konteks di pedesaan Sinjai belum terlalu terlihat. Artikel ini masih meninggalkan banyak lubang, sehingga prospek mengenai studi skema kebijakan pedesaan di Indonesia masih cukup besar. Seperti, bagaimana desain organisasi pemberdayaan yang efektif, tata kelola anggaran dalam pemberdayaan dan studi yang sama dengan karakter berbeda misalnya bagaimana potret dari berbagai skema kebijakan diberbagai Indonesia masih sedikit. Tema-tema ini bisa digarap untuk semakin melengkapi konteks skema kebijakan pemberdayaan di pedesaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Jin, J., & Khan, A. (2022). [Does the Indonesian farmer empowerment policy enhance the professional farmer? Empirical evidence based on the difference-in-difference approach](https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2022.101924). *Technology in Society*, 68, 101924. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2022.101924>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). [Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia](https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047). *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Abdur Rozaki, & Siti Rohaya. (2019). [Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES](https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.46). *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.29062/engagement.v3i1.46>
- Amri, K. (2019). [Bumdes Acceleration Towards Mandiri Village](https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.236). *Iapa Proceedings Conference*, 6, 268. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.236>
- Arifudin, Nasrul, B., & Maswadi. (2013). [Program of Community Empowerment Prevents Forest Fires in Indonesian Peat Land](https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.020). *Procedia Environmental Sciences*, 17, 129–134. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.020>
- BPS. (2023a). [Angka Pengangguran Terbuka](#).
- BPS. (2023b). [Tingkat Kemiskinan di Indonesia](#).
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). [Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera](https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855). *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). [Local Capacity, Village Governance, and the Political Economy of Rural Development in Indonesia](https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2005.11.025). *World Development*, 34(11), 1958–1976. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2005.11.025>
- Cole, S. (2006). [Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism](https://doi.org/10.2167/jost607.0). *Journal of Sustainable Tourism*, 14(6), 629–644. <https://doi.org/10.2167/jost607.0>
- Dye, T. R. (1967). [Governmental Structure, Urban Environment, and Educational Policy](https://doi.org/10.2307/2108617). *Midwest Journal of Political Science*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.2307/2108617> (2)
- Gallaway, J. H., & Bernasek, A. (2004). [Literacy and women's empowerment in Indonesia: Implications for policy](https://doi.org/10.1080/00213624.2004.11506713). *Journal of Economic Issues*, 38(2), 519–525. <https://doi.org/10.1080/00213624.2004.11506713>/ASSET//CMS/ASSET/319A6DB5-B8E6-4A4A-AAEE-AFDC922924B6/00213624.2004.11506713.FP.PNG (2)
- Gibson, C., & Woolcock, M. (2008). [Empowerment, deliberative development, and local-level politics in Indonesia: Participatory projects as a source of countervailing power](https://doi.org/10.1007/s12116-008-9021-0). *Studies in Comparative International Development*, 43(2), 151–180. <https://doi.org/10.1007/s12116-008-9021-0>
- Guerreiro, S., & Botetzagias, I. (2018). [Empowering communities—the role of intermediary organisations in community renewable energy projects in Indonesia](https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1394830). *Local Environment*, 23(2), 158–177. <https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1394830>

- Haryo Limanseto. (2022). *Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3624/dukungan-program-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm-untuk-memperkuat-stabilitas-ekonomi-daerah> (2)
- Hohe, T. (2004). *Local Governance after Conflict: Community Empowerment in East Timor*. <https://doi.org/10.1080/15423166.2004.681592442113>, 1(3), 45–56.
- Hugo, G. (2003). *Information, Exploitation and Empowerment: The Case of Indonesian Overseas Workers*. <http://dx.doi.org/10.1177/011719680301200402>, 12(4), 439–466. <https://doi.org/10.1177/011719680301200402>
- Hermawati, W., Ririh, K. R., Ariyani, L., Helmi, R. L., & Rosaira, I. (2023). *Sustainable and green energy development to support women's empowerment in rural areas of Indonesia: Case of micro-hydro power implementation*. *Energy for Sustainable Development*, 73, 218–231. <https://doi.org/10.1016/J.ESD.2023.02.001>
- Ikhwanasyah, I., Afriana, A., Faisal, P., & Trisnamansyah, P. (2020). *An empowerment of a village economy: (BUMDES) in Indonesia*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(8), 192–207.
- Jakimow, T. (2018). *Beyond 'State Ibuism': Empowerment Effects in State-led Development in Indonesia*. *Development and Change*, 49(5), 1143–1165. <https://doi.org/10.1111/dech.12374>
- Kiky Sreirejeki. (2018). *Empowering the role of village owned enterprises(BUMDes) for rural development: case of Indonesia*. *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20(1), 5–10.
- Koeswahyono, I., Maharani, D. P., & Liemanto, A. (2022). *Legal breakthrough of the Indonesian job creation law for ease, protection, and empowerment of MSMEs during the COVID-19 pandemic*. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2084895>
- Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). *Women's empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism*. *International Journal of Rural Management*, 15(1), 137–157. <https://doi.org/10.1177/0973005219836576>
- Lutfitasari, A., & Mulyani, S. (2022). *Critical Success Factors for BUMDes: Case Study In Magelang Regency*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(1).
- Lasmi Ariyanti. (2023). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>
- Maryunani, S. R. (2019). *Community Empowerment as a Means in Promoting Local Products: A Case Study in Bandung, Indonesia*. *Journal of Promotion Management*, 25(3), 439–451. <https://doi.org/10.1080/10496491.2019.1557821>
- Maton, K. I. (2008). *Empowering community settings: Agents of individual development, community betterment, and positive social change*. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 4–21. <https://doi.org/10.1007/S10464-007-9148-6/METRICS>

- Muddassar Khan, M., Mohamed Rasli, A., & Bahru, J. (2015). [Relationship between Organization Culture, Empowerment and Conflict](#). *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 324–329. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijefi/issue/31972/352298>
- McIntyre-Mills, J., Corcoran-Nantes, Y., Widianingsih, I., & Wirawan, R. (2019). [Alam Endah: Rural Camelot in West Java—A Case Study of Empowerment and Integrated Rural Development](#). 181–194. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04891-4_7
- Natland, S., & Hansen, R. (2017). [Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership](#). *European Journal of Social Work*, 20(4), 497–508. <https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1207615>
- Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. Bin. (2010). [The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development](#). *Journal of Human Ecology*, 30(2), 85–92. <https://doi.org/10.1080/09709274.2010.11906276>
- Nugroho, Y. (2010). NGOs, [THE INTERNET AND SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT](#). *Information, Communication & Society*, 13(1), 88–120. <https://doi.org/10.1080/13691180902992939>
- Pigg, K. E. (2002). [Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community Development](#). *Journal of the Community Development Society*, 33(1), 107–123. <https://doi.org/10.1080/15575330209490145> (2) (3) (4) (5)
- Rustinsyah, R. (2019). [The significance of social relations in rural development: A case study of a beef-cattle farmer group in Indonesia](#). *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 7(2), 100088. <https://doi.org/10.1016/J.JCOM.2019.100088>
- Sakhiyya, Z., & Locke, K. (2019). [Empowerment vs. meritocracy discourses in Indonesian public universities: The case of female leaders](#). *Asian Journal of Women's Studies*, 25(2), 198–216. <https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1610210> (2)
- Salam, Anisa Nur. (2018). [Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa \(BUMDES\)](#). *Az Zarka*, 10(5), 370–396.
- Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013a). [Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development](#). *Procedia Environmental Sciences*, 17, 1007–1016. <https://doi.org/10.1016/J.PROENV.2013.02.120>
- Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013b). Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 1007–1016. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.120>
- Spreitzer, G. (2007). [Giving peace a chance: organizational leadership, empowerment, and peace](#). *Journal of Organizational Behavior*, 28(8), 1077–1095. <https://doi.org/10.1002/JOB.487> (2)
- Staples, L. H. (1990). [Powerful Ideas About Empowerment](#). *Administration in Social Work*, 14(2), 29–42. https://doi.org/10.1300/J147V14N02_03
- Venning, P. (2010). [Marrying Contested Approaches: Empowerment and the Imposition of International Principles: Domestic Violence Case Resolution in Indonesia](#). *The Journal of Development Studies*, 46(3), 397–416. <https://doi.org/10.1080/00220380903002913>

- Vernon, A., & Qureshi, H. (2000). [Community care and independence: self-sufficiency or empowerment?](http://dx.doi.org/10.1177/026101830002000204) *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/026101830002000204*, 20(2), 255–276. <https://doi.org/10.1177/026101830002000204>
- Webster, K., Chen, C., & Beardsley, K. (2019). [Conflict, Peace, and the Evolution of Women's Empowerment.](https://doi.org/10.1017/S0020818319000055) *International Organization*, 73(2), 255–289. <https://doi.org/10.1017/S0020818319000055>
- Wijaya, A. F., Kuntariningsih, A., Sarwono, S., & Suryono, A. (2021). [Malnutrition mitigation and community empowerment through the sustainable food reserve programme in Indonesia.](https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1782845) *Development in Practice*, 31(1), 37–48. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1782845>